



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## SINERGI LINTAS LEMBAGA UNTUK MEMPERKUAT PEMBERANTASAN JUDI ONLINE DI INDONESIA

**Marfuatul Latifah**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[marfuatul.latifa@dpr.go.id](mailto:marfuatul.latifa@dpr.go.id)

**Desty Bulandari**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[desty.bulandari@dpr.go.id](mailto:desty.bulandari@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pada 1 November 2024 Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengungkap keterlibatan 11 orang termasuk pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam sindikat judi *online* di Bekasi. Dalam penyidikan kasus ini polisi menyita lebih dari Rp73 miliar dan berbagai aset berharga, yang diduga merupakan hasil dari pemberian perlindungan terhadap situs judi agar tidak diblokir. Selain dikenai ancaman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, para tersangka juga akan dijerat dengan tindak pidana pencucian uang.

Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, mempertanyakan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Judi *Online* yang dibentuk pada era Presiden Joko Widodo, sebab sejak dibentuk pada Juli 2024 Satgas yang dibentuk melalui Keputusan Presiden belum menunjukkan capaian yang memuaskan, khususnya dalam hal penegakan hukum. Hal tersebut berbanding terbalik dengan respons cepat Polri menindaklanjuti perintah lisan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas judi *online*. Dalam hal ini Sugeng menegaskan bahwa *political will* dari pemerintah, khususnya presiden merupakan kunci utama keberhasilan pemberantasan perjudian *online*.

Pemberantasan judi *online* merupakan salah satu persoalan prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 4 November 2024 Presiden Prabowo Subianto membentuk *Desk* Penanganan Judi *Online* yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan bekerja bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memetakan sistem pembayaran terkait judi *online*, memutus aliran dana, hingga menutup alat bayar yang digunakan dalam transaksi ilegal tersebut. Selain itu, pemerintah menerapkan strategi pencegahan judi *online* dengan meningkatkan edukasi untuk menciptakan kesadaran, memutus jaringan judi *online*, dan memberikan hukuman tegas bagi pelanggar aturan. Sinergi antar-pemangku kepentingan melalui *Desk* Penanganan Judi *Online* diharapkan dapat segera menanggulangi masalah perjudian *online* di masa mendatang.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 6 November 2024, bahwa praktik perjudian *online* di Indonesia berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dibuktikan dengan data perputaran dana terkait perjudian *online* di Indonesia. Pada pertengahan semester 2024 perputaran dana terkait praktik perjudian *online* diperkirakan mencapai Rp283 triliun pada 2024, jumlah tersebut meningkat 237,48% dari perputaran dana dalam praktik judi *online* pada keseluruhan tahun 2023, yaitu Rp327 triliun.

Ivan menjelaskan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan modus operandi dalam praktik perjudian *online*, seperti bandar judi yang menyediakan transaksi dengan nominal kecil sehingga memudahkan lebih banyak orang untuk terlibat. Bahkan, kini judi *online* dapat dimulai hanya dengan Rp10 ribu, yang membuat transaksi judi semakin meluas. Selain itu, pengendalian situs judi *online* dari luar yurisdiksi penegakan hukum Indonesia, seperti Negara Filipina menyulitkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online*.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah mengarahkan agar instansi penegak hukum bekerja sama untuk menanggulangi judi *online*. Dalam arahan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga, seperti Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut harus diimbangi dengan komitmen bersama untuk tidak melindungi aktivitas ilegal ini. Meutya menjelaskan, Presiden menyadari bahwa mayoritas korban judi *online* adalah masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Presiden percaya bahwa dengan memerangi judi *online*, daya beli masyarakat dapat membaik dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Dengan kata lain, sinergi lintas lembaga dalam memberantas judi *online* tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan.

## Atensi DPR

Komisi III DPR RI perlu menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pelaksanaan tugas oleh *Desk* Penanganan Judi *Online* yang dipimpin Kepala Polri berjalan efektif. Hal itu dapat dilakukan melalui pembentukan panitia kerja (Panja) pengawasan pemberantasan perjudian *online*. Panja pengawasan tersebut dapat membantu terciptanya sinergitas antar-lembaga yang tergabung dalam *Desk* Penanganan Judi *Online*. Selain itu, Panja pengawasan penanganan judi *online* dapat membantu pengawasan terhadap penetapan strategi dan prioritas langkah yang akan ditetapkan dalam penanggulangan dan pencegahan perjudian *online*. Lebih lanjut Panja dapat melakukan pengawasan terhadap langkah penegakan hukum oleh *Desk* Penanganan Judi *Online* guna mempercepat upaya pemberantasan perjudian *online* di Indonesia. Hal tersebut cukup mendesak mengingat masa kerja *Desk* Penanganan Judi *Online* hanya 3 bulan sejak pembentukannya, yaitu 4 November 2024.

## Sumber

antaranews.com, 7 November 2024;  
Laporan Singkat Raker Komisi III tanggal 6 November 2024;  
megapolitan.kompas.com, 8 November 2024;  
*Rakyat Merdeka*, 7 November 2024;  
tempo.co, 6 November 2024.



## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

